



Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal, Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
(Studi Kasus Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021)

Fernanda Alivia Defana¹⁾ ; Sri Rahayu²⁾

¹⁾Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Telkom University

²⁾Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Telkom University

Email: ¹⁾ fernanda.alifia27@gmail.com ; ²⁾ sriahayu@telkomuniversity.ac.id

How to Cite :

Defana, F.A., Rahayu, S., (2023). Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal, Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021). *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1). doi: <https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i1>

ARTICLE HISTORY

Received [13 Juli 2022]

Revised [04 Agustus 2022]

Accepted [23 Desember 2022]

KEYWORDS

Kualitas Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kualitas Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal, dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah baik secara simultan maupun secara parsial. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian deskriptif verifikatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai BKAD Kabupaten Bandung Barat di Bidang Pengelolaan BMD dan Bidang Akuntansi. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan non-probability sampling melalui sampling jenuh, dimana semua anggota populasi dipakai sebagai sampel yaitu diperoleh sebanyak 50 orang pegawai. Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda menggunakan software IBM SPSS versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan, sistem pengendalian internal, dan aksesibilitas laporan keuangan secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sedangkan kualitas laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of Quality of Financial Reports, Internal Control Systems, and Accessibility of Financial Reports on Regional Financial Management Accountability both simultaneously and partially. This research is included in the verification descriptive research. The population in this study were all BKAD employees of West Bandung Regency in the BMD Management and Accounting fields. Sampling technique in this study used non-probability sampling through saturated sampling, where all members of the population were used as samples, obtained as many as 50 employees. The data analysis model used in this study is multiple linear regression analysis using software version 25. The results show that the quality of financial reports, internal control systems,

and accessibility of financial reports simultaneously affect the accountability of regional financial management. Based on the partial test results, the internal control system has no effect on the accountability of regional financial management, while the quality of financial reports and the accessibility of financial reports have a positive effect on the accountability of regional financial management.

PENDAHULUAN

Pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas yang ada kaitannya dengan tanggungjawabnya, termasuk penerimaan dan pengeluaran uang publik kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan masyarakat yang mempunyai hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Hardiningsih *et al.*, 2019). Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah, akuntabilitas yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 1 ayat 10 mengatur bahwa Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu kepala daerah dikarenakan jabatannya mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, penatausahaan, pelaporan, pengawasan, dan pertanggungjawaban yang harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada publik dan DPRD untuk mengukur kesuksesan maupun kegagalan sebagai bahan pertimbangan tahun berikutnya (Artini & Samtika Putra, 2020).

Peran pemerintah dalam mengelola keuangan daerah adalah bentuk pelayanan kepada masyarakat dengan cara menyajikan laporan keuangan yang akuntabel, memberikan informasi keuangan secara terbuka dan memberikan pengawasan dalam proses pengelolaan keuangan agar menghasilkan pengelolaan keuangan yang dipertanggungjawabkan (Hardiningsih *et al.*, 2019). Selain memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan daerah, masyarakat juga memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban atas pengaplikasian dan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut (Fauziah & Handayani, 2017). Akuntabilitas mencerminkan komitmen pemerintah dalam melayani publik, jika tidak memiliki komitmen yang baik berarti akuntabilitasnya pun kurang dan harus ditingkatkan lagi (Riantiaro & Azlina, 2011).

Menurut Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat, terdapat beberapa hal yang mempengaruhi penilaian BPK RI sehingga Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2020 kembali mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian, diantaranya karena adanya SKPD yang tidak berkomitmen dengan baik dalam pengelolaan keuangan daerah. Jika ada satu SKPD saja yang tidak berkomitmen dengan baik dalam pengelolaan keuangan daerah maka hal itu akan berpengaruh terhadap penilaian BPK RI. Kabupaten Bandung Barat tidak memiliki komitmen yang baik dalam pengelolaan keuangan daerah berarti pemerintah Kabupaten Bandung Barat perlu meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah yang tentu akan meningkatkan kinerja pemerintah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat Asep Sodikit meminta bahwa seluruh SKPD di Kabupaten Bandung Barat dapat berkomitmen dalam pengelolaan keuangan agar harapan dalam meraih Wajar Tanpa Pengecualian bisa terlaksana ditahun berikutnya (Gimnastiar, 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Kualitas Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal, dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah secara simultan maupun secara parsial pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2021.

LANDASAN TEORI

Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik merupakan sistem yang digunakan oleh lembaga-lembaga publik untuk salah satu alat pertanggungjawaban kepada publik (Handayani, 2019). Menurut Handayani (2019), terdapat beberapa tujuan dari akuntansi sektor publik diantaranya sebagai berikut:

1. Memberikan informasi yang dibutuhkan untuk mengelola suatu sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi dengan tepat, efisien, dan ekonomis. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen.
2. Memberikan informasi yang memungkinkan manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab yang tepat dan efektif serta pengguna sumber daya yang menjadi wewenang dan juga memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil kegiatan pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas.

Laporan Keuangan Sektor Publik

Dari sisi manajemen perusahaan, laporan keuangan digunakan sebagai alat pengendalian dan menilai kinerja manajerial dan organisasi, sedangkan dari sisi pemakai eksternal laporan keuangan sebagai salah satu bentuk mekanisme pertanggungjawaban dan berguna untuk dasar pengambilan keputusan (Handayani, 2019). Adapun tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik adalah Kepatuhan dan Pengelolaan (*Compliance and Stewardship*), Akuntabilitas dan Pelaporan Retrospektif (*Accountability and Estrospective Reporting*), Perencanaan Dan Informasi Otorisasi (*Planning and Authorization Information*), Kelangsungan Organisasi (*Viability*), Hubungan Masyarakat (*Public Relation*), dan Sumber Fakta Dan Gambaran (*Source of Facts and Figures*) (Handayani, 2019).

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan, dan pertanggungjawaban yang harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada publik dan DPRD untuk mengukur kesuksesan maupun kegagalan sebagai bahan pertimbangan tahun berikutnya (Artini & Samtika Putra, 2020). Pengelolaan keuangan daerah dapat diukur dengan: (1) Perencanaan, (2) Pelaksanaan, (3) Penatausahaan, (4) Pelaporan, (5) Pertanggungjawaban, (6) Pengawasan (Supriyadi *et al.*, 2017).

Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah, kualitas laporan keuangan merupakan ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi laporan keuangan pemerintah sehingga dapat memenuhi tujuannya, dan informasi laporan keuangan pemerintah harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif yang terdiri dari: (1) Relevan, (2) Andal, (3) Dapat dibandingkan, (4) Dapat Dipahami.

Kualitas laporan keuangan dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, karena laporan keuangan yang berkualitas merupakan salah satu bentuk atau pertanggungjawaban pemerintah dalam melaksanakan akuntabilitas.

Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Internal merupakan suatu proses integral dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus untuk memberi keyakinan yang memadai dalam hal pencapaian tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan informasi keuangan, perlindungan aset negara, dan kepatuhan terhadap undang-undang (Hardiningsih *et al.*, 2019). Komponen-komponen sistem pengendalian internal adalah proses yang dibutuhkan agar

dapat mencapai tujuan pengendalian internal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, komponen pengendalian internal terdiri dari: (1) Lingkungan Pengendalian, (2) Penilaian Risiko, (3) Kegiatan Pengendalian, (4) Informasi dan Komunikasi, dan (5) Pemantauan.

Pada dasarnya, upaya untuk menciptakan dan meningkatkan sistem pengendalian internal merupakan salah satu cara dalam mencegah terjadinya kecurangan. Adanya sistem pengendalian internal yang optimal akan menjamin bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara konsisten sesuai peraturan aturan yang berlaku.

Aksesibilitas Laporan Keuangan

Aksesibilitas laporan keuangan adalah proses pengungkapan laporan keuangan agar dapat dikonsumsi oleh masyarakat, dengan adanya aksesibilitas laporan keuangan yang tepat dapat menciptakan hubungan yang baik antara pemerintah dengan masyarakat (Artini & Samtika Putra, 2020). Kriteria dari aksesibilitas laporan keuangan yaitu pemerintah daerah harus memenuhi: (1) Keterbukaan, (2) Kemudahan, (3) *Accessible* (Fauziyah & Handayani, 2017).

Aksesibilitas laporan keuangan daerah dikatakan baik, jika pemerintah mampu memberikan fasilitas dan memberikan kemudahan akses kepada publik, hal tersebut dapat menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang berjalan dengan efektif dan efisien.

METODE PENELITIAN

Metode Analisis

Penelitian ini dilakukan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat di Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Bidang Perbendaharaan, Akuntansi, dan Pelaporan. Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode sampling jenuh, dimana semua anggota populasi digunakan sebagai sampel yaitu sebanyak 50 orang pegawai. Teknik pengumpulan data primer pada penelitian ini yaitu dengan menyebarkan kuesioner. Pada penelitian ini dilakukan uji validitas, uji reliabilitas, dan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heterokedastisitas. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis regresi berganda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan statistik yang bertujuan untuk menjelaskan atau menggambarkan keadaan data hasil penelitian tanpa bermaksud menarik kesimpulan yang berlaku umum. Hasil uji statistik deskriptif pada penelitian ini adalah:

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	Nilai Indeks Maksimum	Total Skor	Persentase	Kategori
Kualitas Laporan Keuangan	2500	2059	82%	Baik
Sistem Pengendalian Internal	2750	2142	78%	Baik
Aksesibilitas Laporan Keuangan	1500	1193	80%	Baik
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	3750	3019	81%	Baik

Sumber: Data yang diolah penulis (2022)

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif diatas menunjukkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini berada dalam kategori baik karena persentase yang ditunjukkan berada pada interval > 68% - 84%.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Pada uji normalitas dihasilkan nilai signifikansi (Asymp. Sig.) sebesar 0,200. Nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 sehingga dapat diartikan bahwa data telah berdistribusi normal serta memenuhi asumsi normalitas sehingga layak untuk digunakan dalam penelitian.

Uji Multikolinearitas

Pada uji multikolinearitas dihasilkan nilai tolerance sudah lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10, yang artinya tidak terjadi multikolinearitas antara variabel Kualitas Laporan Keuangan (X1), Sistem Pengendalian Internal (X2), dan Aksesibilitas Laporan Keuangan (X3).

Uji Heterokedastisitas

Berdasarkan hasil uji heterokedastisitas dapat disimpulkan bahwa grafik scatterplot terdapat titik-titik menyebar secara acak dan tersebar dengan baik diatas ataupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini menandakan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) berdasarkan masukan variabel independen Kualitas Laporan Keuangan (X1), Sistem Pengendalian Internal (X2), dan Aksesibilitas Laporan Keuangan (X3).

Analisis Regresi Berganda

Tabel 2. Hasil Pengujian Analisis Regresi Berganda

Coefficients ^a			
Model		Unstandardized Coefficients	
		B	Std. Error
1	(Constant)	22,516	6,814
	Kualitas Laporan Keuangan	0,859	0,081
	Sistem Pengendalian Internal	-0,158	0,090
	Aksesibilitas Laporan Keuangan	0,389	0,185
a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah			

Sumber: Data yang diolah penulis (2022)

Berdasarkan output pada tabel 1 terdapat nilai konstansta dan koefisien regresi sehingga dapat dibentuk persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = 22,516 + 0,859 X1 - 0,158 X2 + 0,389 X3$$

Dari persamaan diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- $a = 22,516$ Artinya jika variabel Kualitas Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal, dan Aksesibilitas Laporan Keuangan bernilai konstan, maka Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan daerah sebesar 22,516.
- $b1 = 0,859$ Artinya jika Kualitas Laporan Keuangan meningkat sebesar satu satuan, maka variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah akan ikut meningkat sebesar 0,859.

- $b_2 = -0,158$ Artinya jika Sistem Pengendalian Internal meningkat sebesar satu satuan, maka variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah akan ikut menurun sebesar 0,158.
- $b_3 = 0,389$ Artinya jika Aksesibilitas Laporan Keuangan meningkat sebesar satu satuan, maka variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah akan ikut meningkat sebesar 0,389.

Uji Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 3. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.865 ^a	0,749	0,732	2,912
a. Predictors: (Constant), Aksesibilitas Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal, Kualitas Laporan Keuangan				

Sumber: Data yang diolah penulis (2022)

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada tabel 2 dapat dilihat bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0,732. Hal ini diartikan bahwa variabel independen yaitu Kualitas Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal, dan Aksesibilitas Laporan Keuangan dapat menjelaskan variabel dependen yaitu Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 73,2% dan sisanya sebesar 26,8% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian.

Uji Simultan (Uji F)

Uji simultan merupakan sebuah uji yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen (X) secara simultan (bersama-sama) mempengaruhi variabel dependen (Y). Berikut ini merupakan hasil uji simultan yang diolah menggunakan software SPSS versi 25:

Tabel 4. Hasil Pengujian Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1161,617	3	387,206	45,651	.000 ^b
	Residual	390,163	46	8,482		
	Total	1551,780	49			
a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah						
b. Predictors: (Constant), Aksesibilitas Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal, Kualitas Laporan Keuangan						

Sumber: Data yang diolah penulis (2022)

Berdasarkan hasil uji simultan pada tabel 3 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak artinya Kualitas Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal, dan Aksesibilitas Laporan Keuangan secara simultan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Uji Parsial (Uji T)

Uji parsial merupakan sebuah uji yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Berikut ini merupakan hasil uji parsial yang diolah menggunakan software SPSS versi 25:

Tabel 5. Hasil Pengujian Parsial (Uji T)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	22,516	6,814		3,305	0,002
	Kualitas Laporan Keuangan	0,859	0,081	0,801	10,572	0,000
	Sistem Pengendalian Internal	-0,158	0,090	-0,132	-1,751	0,087
	Aksesibilitas Laporan Keuangan	0,389	0,185	0,156	2,097	0,042

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Sumber: Data yang diolah penulis (2022)

Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal, dan Aksesibilitas laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil pengujian secara simultan seperti yang ditunjukkan pada tabel 3 diperoleh hasil nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak artinya Kualitas Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal, dan Aksesibilitas Laporan Keuangan secara simultan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat. Semakin baik Kualitas Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal, dan Aksesibilitas Laporan Keuangan maka dapat mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Antika *et al.*, 2020), (Artini & Samtika Putra, 2020), (Fikrian, 2017) yang menyatakan bahwa Kualitas Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal, dan Aksesibilitas Laporan Keuangan secara simultan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial seperti yang ditunjukkan pada tabel 4 diperoleh nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak artinya Kualitas Laporan Keuangan secara parsial berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat. Semakin berkualitas laporan keuangan, maka semakin baik akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Hasil penelitian ini didukung dengan penjelasan hasil pengujian statistik deskriptif mengenai tanggapan responden terkait variabel Kualitas Laporan Keuangan yang memperoleh skor rata-rata persentase sebesar 82%, skor tersebut berada pada kategori baik. Hal ini dapat diartikan bahwa laporan keuangan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat disajikan dengan tepat waktu, lengkap, dapat membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu, memprediksi masa depan, sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan, disajikan sesuai fakta, bebas dari pemahaman yang menyesatkan dan dapat diverifikasi, laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya, dan laporan keuangan dapat memberikan informasi yang dapat dimengerti oleh pengguna laporan keuangan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Fikrian, 2017), dan (Lumentut *et al.*, 2014) yang menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial seperti yang ditunjukkan pada tabel 4 diperoleh nilai signifikansi $0,087 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima artinya Sistem Pengendalian Internal secara parsial tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat. Sistem pengendalian internal yang belum baik belum tentu menghasilkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang rendah di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Berdasarkan statistik deskriptif mengenai tanggapan responden terkait variabel sistem pengendalian internal memperoleh skor dengan kategori baik sebesar 78%. Hal tersebut membuktikan bahwa pegawai telah melakukan sistem pengendalian internal yang baik, tetapi pada indikator informasi dan komunikasi memperoleh skor paling rendah yaitu sebesar 76%. Dari 50 responden yang menjawab pernyataan pada indikator informasi dan komunikasi terdapat 18 responden yang menyatakan bahwa responden ragu-ragu. Pada implementasinya Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat belum melaksanakan sistem pengendalian internal yang baik seperti menyajikan informasi secara tepat waktu dan membuat saluran komunikasi yang terbuka agar masyarakat, rekanan, atau aparat pengawas intern dapat memberikan masukan signifikan sehingga pimpinan dapat segera menjalankan pengendalian dan tanggung jawabnya, dan juga belum menerapkan pemisahan tugas dan wewenang yang memadai sehingga masih adanya pegawai yang merangkap jabatan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Artini & Samtika Putra, 2020) dan (Putri, 2018) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial seperti yang ditunjukkan pada tabel 4 diperoleh nilai signifikansi $0,042 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak artinya Aksesibilitas Laporan Keuangan secara parsial berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat. Semakin mudahnya pengguna laporan keuangan dalam mengakses informasi mengenai laporan keuangan maka dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Hasil penelitian ini didukung dengan penjelasan hasil pengujian statistik deskriptif mengenai tanggapan responden terhadap Aksesibilitas Laporan Keuangan yang memperoleh skor rata-rata persentase sebesar 80%, skor tersebut berada pada kategori baik. Hal ini dapat diartikan bahwa Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat sudah memberikan kemudahan untuk publik dalam mendapatkan informasi mengenai laporan keuangan, sudah memberikan akses yang terbuka kepada pengguna laporan keuangan, dan laporan keuangan dapat diakses melalui media internet atau website.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Antika *et al.*, 2020), (Hardiningsih *et al.*, 2019), dan (Jatmiko *et al.*, 2019) yang menyatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pengujian hipotesis secara simultan, diperoleh bahwa Kualitas Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal, dan Aksesibilitas Laporan Keuangan secara simultan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021. Berdasarkan pengujian hipotesis secara parsial,

diperoleh bahwa Kualitas Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan secara parsial berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021. Sedangkan, Sistem Pengendalian Internal secara parsial tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021.

Saran

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek penelitian atau menambah jumlah sampel yang diteliti yang memiliki masalah dalam pengelolaan keuangan daerah, menambah atau menggunakan variabel lain yang belum diteliti yang berhubungan dengan hal-hal yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, dan juga dapat menambah metode wawancara untuk pengumpulan data untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap jawaban responden.

Bagi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat, disarankan agar dapat mempertahankan kualitas laporan keuangan dengan menyajikan laporan keuangan yang relevan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, yang disajikan tepat waktu, dan dapat digunakan untuk mengoreksi aktivitas keuangan di masa lalu, memprediksi peristiwa di masa depan sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Serta untuk meningkatkan sistem pengendalian internal baiknya lebih optimal dalam menyajikan informasi secara tepat waktu agar memungkinkan untuk dilakukan tindakan korektif dan saluran komunikasi yang lebih terbuka kepada masyarakat, rekanan, atau aparat pengawas intern dalam memberikan masukan sehingga pimpinan dapat segera menjalankan pengendalian dan tanggung jawabnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Antika, Z., Murdyanti, Y., & Hafifah, N. (2020). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan, dan Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, 15(2).
- Artini, N. L. W., & Samtika Putra, I. P. D. (2020). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 1(2).
- Fauziah, M. R., & Handayani, N. (2017). Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(6).
- Fikrian, H. (2017). Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan, Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru). *JOM FEKON*, 4(1).
- Gimnastiar, S. (2021). Kini KBB Hanya Mendapat WDP Dari BPK RI. *Bandung Barat Pos*. <https://www.bandungbaratpos.com/2021/05/26/aduh-turun-peringkat-kini-kbb-hanya-mendapat-wdp-dari-bpk-ri/>
- Handayani, M. (2019). *Akuntansi Sektor Publik: Dilengkapi 100 Soal Latihan Dan Jawaban*. Poliban Press.
- Hardiningsih, P., Meita, R., Srimindarti, C., & Kristiana, I. (2019). Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang). *Jurnal Akuntansi Syariah*, 2(1).
- Jatmiko, B., Prawoto, N., Puji Astuti, R., Nuhnita Sari, R., & Fil Ardhi, K. (2019). Application of Government Accounting Standards, Financial Statements Reporting, and Accessibility of Regional Finance Against Accountability for Regional Financial Management (Survey of All SKPDs of Kulon Progo Regency Government). *Advances in Economic, Business, and Management Research*, 102.
- Lumentut, D. F., Noholo, S., & Lukum, A. (2014). Pengaruh Kualitas Pelaporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pemerintah Daerah Kota Gorontalo. 12(2).

- Putri, M. (2018). Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Wonogiri). *Institut Agama Islam Negeri Surakarta*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Riantiarno, & Azlina. (2011). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan. *Jurnal Pekbis*, 3(3).
- Supriyadi, B., Suwardana, D., & Manghayu, A. (2017). *Kebijakan Akuntansi Akrual Pemerintah Daerah*. Ghalia Indonesia.